



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EVY HARYADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR TRANSMISI DAN PERENCANAAN SISTEM**
3. NHK : **186422**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m²/216 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/101 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 779.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ESTEEM SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE JEEP Tahun 2015, LAINNYA Rp. 250.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC TURBO SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. MOTOR, YAMAHA R15M WGP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. MOTOR, YAMAHA XSR 155 WGP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 9.808.925.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.005.018.644



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	21.022.943.644
III. HUTANG	Rp.	581.552.220
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	20.441.391.424

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.